

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Bank merupakan mitra dalam rangka memenuhi semua kebutuhan keuangan sehari-hari. Bank dijadikan sebagai tempat untuk melakukan berbagai transaksi yang berhubungan dengan keuangan seperti: tempat menyimpan uang, melakukan investasi, melakukan pembayaran, atau melakukan penagihan. Bank bagi masyarakat yang hidup dinegara-negara maju, seperti negara-negara di Eropa, Amerika dan Jepang sudah merupakan suatu kebutuhan dasar.

Bagi suatu negara Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Oleh karena itu, peran perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Dengan kata lain kemajuan suatu bank disuatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang bersangkutan. Semakin maju suatu negara, maka semakin besar peran perbankan dalam mengendalikan negara tersebut. Artinya, keberadaan dunia perbankan semakin dibutuhkan pemerintah dan masyarakatnya.

Sebagai lembaga keuangan yang berorientasi bisnis, kegiatan bank sehari-hari tidak terlepas dari bidang keuangan. Kegiatan bank yang paling pokok adalah menghimpun dana yang berhasil dihimpun dengan cara menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pemberian pinjaman atau kredit.

Selain dengan pesatnya pembangunan di Indonesia khususnya pembangunan ekonomi, maka lembaga keuangan seperti bank merupakan salah satu alat untuk membantu kelancaran dibidang ekonomi baik dari segi penyedia modal berupa pemberian kredit, peran bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah terlepas dari masalah kredit, bahkan pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah kredit yang disalurkan akan menentukan keuntungan bank. Jika bank tidak mampu menyalurkan kredit sementara dana yang dihimpun dari simpanan cukup banyak maka bank kehilangan keuntungan besar. Dalam hal ini, menghimpun dan menyalurkan dana terutama dalam

menyalurkan kredit yang diberikan kepada masyarakat sebagai nasabah dalam dunia perbankan adalah masalah yang sangat penting dan dapat berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap bank.

Tetapi pemberian kredit tidak selalu berjalan dengan lancar dan baik seperti yang diharapkan. Suatu saat pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karena sesuatu hal. Oleh karena itu, pengolahannya harus dilakukan secara professional dengan dibantu pengawasan yang ketat guna pengantisipasi kredit macet. Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan resiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit, dengan demikian bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit adalah suatu hal yang merupakan penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit macet.

Salah satu lembaga keuangan yang ada di Jakarta adalah Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere Sebagai media pembangunan guna menunjang perekonomian masyarakat pada umumnya dan pengusaha kecil khususnya. Salah satu kegiatan Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere adalah menarik uang dari masyarakat dan menyalurkan kembali kepada masyarakat. Dengan kata lain salah satu kegiatan Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere adalah memberi kredit kepada masyarakat. Pemberian Kredit oleh Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere memberikan kemungkinan pada suatu usaha atau perusahaan yang mengembangkan aktivitasnya atau lapangan usaha baru atau untuk kredit konsumtif bagi para nasabah untuk keperluan konsumtif lainnya.

Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere walaupun mempunyai kantor internal yang baik tetap mempunyai permasalahan dalam kredit, Seperti kredit kurang lancar, kredit diragukan dan kredit macet. Dalam hal ini Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere Juga mempunyai Upaya untuk menyelamatkan kredit bermasalah ini dengan cara *Rescheduling*, *Reconditioning* dan *Liquidation*. Kredit bermasalah yang paling banyak terdapat di Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere adalah Kredit Macet

dan upaya penyelamatannya adalah menggunakan *Rescheduling* atau penjadwalan ulang, *Reconditioning* atau persyaratan ulang dan *liquidation* yakni penjualan barang-barang agunan.

Data laporan perkembangan Bank DKI Kantor cabang pembantu Cinere menunjukkan bahwa kredit mengalami permasalahan dalam proses pengembalian, yaitu adanya debitur yang terlambat membayar kredit sampai tanggal jatuh tempo. Bahkan sampai batas toleransi yang telah ditetapkan oleh pihak Bank DKI Kantor cabang pembantu Cinere. Sehingga debitur tersebut di golongan sebagai nasabah yang mengalami kredit macet.

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap penyelesaian dalam kredit macet. Dan adapun judul dari praktek kerja lapangan ini adalah **“Prosedur Penyelesaian Kredit Macet Pada Produk KPR Griya Monas Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere”**.

I.2 Ruang Lingkup

Praktik Kerja Lapangan yang dilakukan penulis pada Bank DKI cabang pembantu Cinere pada bagian Kredit Multiguna dan Kredit KPR. Adapun pelaksanaan kerja praktik yang telah diarahkan oleh bagian Kredit dalam proses pelaksanaannya adalah sebagai berikut :

- a. Membantu memilah berkas permohonan Kredit Multiguna dan Kredit KPR.
- b. Memeriksa kelengkapan data calon debitur Kredit Multiguna dan Kredit KPR.
- c. Melakukan pemasaran kredit melalui telepon untuk menawarkan Kredit Multiguna pada nasabah.
- d. Membantu tahapan pemberian surat peringatan pada Kredit Macet.
- e. Membantu tahapan penyelesaian Kredit Macet pada salah satu debitur.

I.3 Tujuan

Tujuan yang dilakukan penulis dalam pelaksanaan kerja lapangan pada Bank DKI cabang pembantu Cinere adalah sebagai berikut :

a. Tujuan Umum

Tujuan umum dilaksanakan praktik kerja lapangan pada Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere adalah untuk mengetahui mekanisme kerja dari Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere.

b. Tujuan Khusus

Praktik kerja lapangan dilakukan penulis pada Bank DKI Kantor Cabang Pembantu Cinere khususnya pada bagian Kredit. Adapun teknis pelaksanaan kerja praktik pada bagian Kredit adalah penulis terlebih dahulu diberi pengarahan oleh pihak bank pada bagian Pemasaran mengenai tugas-tugas yang harus penulis laksanakan selama kerja praktik, yaitu :

1. Membantu menyiapkan surat penawaran kerja sama Kredit Multiguna ke sekolah-sekolah.
2. Membantu proses pemasaran ke Kepala Sekolah tentang produk Kredit Multiguna.
3. Membantu mempromosikan Kredit Multiguna melalui saluran telepon.
4. Membantu proses akad KPR (Kredit Peminjaman Rumah), pada salah satu debitur.
5. Membantu proses terjadinya kredit macet pada bank.
6. Membantu proses penyelesaian Kredit Macet pada debitur.

I.4 Sejarah Bank DKI

Bank DKI merupakan Bank Umum dan Badan Usaha Milik Daerah yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 99,95% dan PD Pasar Jaya sebesar 0,05% . Bank DKI kini telah tumbuh menjadi Bank Umum beraset Rp 30,74 triliun, dengan jaringan kantor mencapai 221 kantor yang tersebar di Jakarta dan beberapa kota besar di Indonesia, dengan sumber daya manusia 2.549 karyawan serta ragam produk dan layanan perbankan kepada lebih dari satu juta nasabah.

Bank DKI pertama kali didirikan pada tanggal 30 April 1961 dan berkantor pusat di Jakarta Pusat dengan nama “PT. Bank Pembangunan Daerah

Djakarta Raya” sebagaimana termaktub dalam akta Perseroan Terbatas Perusahaan Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya (PT. Bank Pembangunan Daerah Djakarta Raya) No. 30 tanggal 11 April 1961 dibuat oleh dan dihadapan Eliza Pondaag S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. J.A.5/31/13 tanggal 11 April 1961 dan telah didaftarkan dalam buku register di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 1274 tanggal 26 Juni 1961 serta telah diumumkan dalam Tambahan No.206 Berita Negara Republik Indonesia No. 41 tanggal 1 Juni 1962.

Dalam rangka penyesuaian dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No.13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, kedudukan hukum Perseroan diubah dan dialihkan dari Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jakarta Raya menjadi Bank Pembangunan Daerah DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Daerah, Jakarta - DKI No.6 Tahun 1978 tanggal 21 Agustus 1978 tentang Bank Pembangunan Daerah Jakarta (BPD Jaya) yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Pem. 10/87/1-858-sk. Tanggal 5 Desember 1978 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah DKI Jakarta No. 12 Tahun 1979 Seri D No. 11 tanggal 2 Mei 1979 serta sebagaimana Peraturan Daerah No. 1 Tahun 1993 tanggal 15 Januari 1993 dengan merubah modal dasar dari sebesar Rp50.000.000.000 menjadi sebesar Rp300.000.000.000 sampai dengan tanggal 5 Mei 1999 dan sejak tanggal 6 Mei 1999 berubah menjadi Perseroan Terbatas dengan modal dasar sebesar Rp700.000.000.000.

Perubahan tersebut telah disetujui oleh Pemerintah Daerah Propinsi DKI Jakarta melalui Peraturan Daerah Propinsi DKI Jakarta No. 1 tahun 1999 tanggal 1 Februari 1999 dengan Akta yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H., No. 4 tanggal 6 Mei 1999 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. C-8270.HT.01.01.Th.99 tanggal 7 Mei 1999. Tanggal 4 Juni 1999, diumumkan dalam Berita Negara No. 45, Tambahan No. 3283.

Ruang lingkup kegiatan Bank adalah untuk menjalankan aktivitas umum perbankan. Pada tanggal 30 November 1992, Bank memperoleh ijin untuk melakukan aktivitas sebagai Bank Devisa berdasarkan SK Direksi Bank Indonesia No. 25/67/KEP/DIR. Pada bulan Maret 2004, Bank mulai melakukan kegiatan operasional berdasarkan prinsip syariah berdasarkan Surat Bank Indonesia No. 6/39/DpbS, tanggal 13 Januari 2004 tentang prinsip pembukuan kantor cabang syariah Bank dalam aktivitas komersial Bank.

Anggaran Dasar Bank telah mengalami beberapa kali perubahan, dan yang terakhir berdasarkan Akta No. 21 Tahun 2008 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Ny Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta pada tanggal 12 September 2008 tentang Perseroan terbatas dan juga mencantumkan perubahan modal dasar menjadi Rp1.500.000.000.000. Perubahan Anggaran Dasar Bank DKI telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan No. AHU-79636.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 29 Oktober 2008.

Bank DKI didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank DKI memiliki Visi dan Misi, Visi Bank DKI yaitu "Menjadi Bank Terbaik yang Membanggakan".

Bank DKI didirikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Bank DKI memiliki Visi dan Misi, Visi Bank DKI yaitu "Menjadi Bank Terbaik yang Membanggakan". Visi tersebut meliputi beberapa poin, yaitu sebagai berikut :

1. Memiliki kinerja yang baik diantara bank sekelasnya.
2. Menjadi bank jangkar yang terbaik.
3. Memiliki kinerja dan reputasi yang baik dan menjadi pilihan utama nasabah dan stakeholder lainnya.
4. Memberikan deviden dan kontribusi yang tinggi kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

5. Karyawan memiliki jalur karir yang jelas dan kesejahteraan yang baik.

Sedangkan, Misi Bank DKI adalah “Bank berkinerja unggul, mitra strategis dunia usaha, masyarakat, dan andalan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang memberikan nilai tambah bagi stakeholder melalui pelayanan terpadu dan professional”.

Bank DKI tampil dengan wajah dan semangat selaras dengan visi dan misinya. Dalam menghadapi persaingan global, Bank DKI harus mampu tampil sempurna, baik internal maupun eksternal. Untuk itu, Bank DKI memosisikan diri sebagai bank global dalam dunia yang terus bergulir cepat. Bank DKI memiliki lambang atau logo yang memiliki ciri khas tertentu dapat dilihat, didalam lambang tersebut memiliki arti dan maksud sebagai berikut :

1. Sebuah Kesederhanaan yang Memberikan Kemudahan
Sejak pertengahan tahun 2011, Bank DKI kembali melakukan penyegaran pada *corporate identity* Bank DKI. Penyegaran tersebut merupakan sebuah simbolisasi dari bentuk kesederhanaan yang memberikan kemudahan kepada nasabah Bank DKI dalam bentuk layanan yang mudah, aman dan nyaman.
2. Pijaran Api Monas yang Menginspirasi Hasrat Berprestasi
Sebuah lingkaran solid dengan empat garis miring yang berujung melengkung lalu lancip. Empat garis tersebut makin memanjang tinggi ke arah kanan. Empat garis tersebut merupakan lidah api dari tugu Monumen Nasional yang dilingkari oleh bulatan berwarna merah adalah sebuah inspirasi hasrat pencapaian kinerja terbaik dan prestasi tertinggi.
3. Kemapanan dan Pengalaman Berkarya
Pengalaman panjang Bank DKI dalam berkiprah di industri perbankan nasional yang disimbolisasikan melalui pemilihan huruf (*typeface*) yang klasif (*serif*) yang mudah diingat dan dilihat. Saratnyatangung jawab dan amanah, huruf *New Century* merupakan representasi yang tepat akan karakter Bank DKI.
4. Ketegasan Dalam Setiap Langkah

Warna yang digunakan untuk *logotype* adalah merah dan hitam 100% yang menggantikan warna hitam 80% yang terdapat pada logo sebelumnya. Sebagai cerminan dari ketegasan setiap langkah maju Bank DKI.

5. Inspirasi Sebagai Sebuah Kebanggaan

Logo Bank DKI sebagai cerminan identitas Bank DKI yang terinspirasi dari api pada tugu Monumen Nasional sebagai kebanggaan bangsa Indonesia yang terletak di ibukota DKI Jakarta, merupakan cita-cita luhur Bank DKI, sebagai *The Great Company and Center Of Excellence* dan Menjadi Bank Terbaik yang Membanggakan.

Bank DKI terus memperkuat tata kelola perusahaan, termasuk struktur pengendalian internal dan manajemen risiko, serta penerapan standar baku operasi yang lebih seragam dan transparan. Prinsip-prinsip dasar pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik di Bank DKI merujuk pada Peraturan Bank Indonesia No.8/4/PBI/2006 dan No.8/14/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia No. 9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007 perihal Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, serta Undang Undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, maupun ketentuan lainnya yang mengatur hal tersebut.

Guna mencapai tingkat penerapan GCG secara maksimal, Bank DKI berpedoman pada prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan operasional perbankan. Prinsip-prinsip GCG yang secara umum dikenal dengan akronim tarif dijabarkan sebagai berikut:

1. *Transparency* yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Accountability* yaitu fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaan berjalan efektif.

3. *Responsibility* yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
4. *Independent* yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpapengaruh atau tekanan dari pihak manapun.
5. *Fairness* yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

Bank DKI sangat *concern* dalam meningkatkan efektivitas fungsi manajemen risiko melalui upaya penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM). ERM merupakan suatu pengelolaan risiko perusahaan secara menyeluruh dan terintegrasi, yang menyelaraskan visi dan misi dengan strategi pemilihan *risk appetite* dan *risk tolerance* serta tindakan mitigasi yang akan dilakukan, sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

I.5 Struktur Organisasi Bank DKI

Struktur organisasi Bank DKI Pusat yang berlokasi di Jalan Ir. H. Juanda III No. 7-9, Jakarta Pusat. Dalam struktur organisasi pada Bank DKI Pusat adapun beberapa tugas dan tanggung jawab untuk setiap masing masing bagian atau jabatan, yaitu sebagai berikut :

1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - a. Mengevaluasi dan mengesahkan laporan tahunan serta keputusan untuk kemajuan perusahaan.
2. Dewan Komisaris
 - a. Mengawasi direksi perusahaan dalam mencapai kinerja dalam *business plan* dan memberikan nasihat kepada direksi mengenai penyimpangan pengelolaan usaha yang tidak sesuai dengan arah yang ingin dituju oleh perusahaan.
 - b. Dewan Komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

- c. Dewan komisaris wajib memastikan bahwa direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal Bank, *auditor external*, hasil pengawasan Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain.
3. Direksi
 - a. Memimpin dan mengendalikan semua kegiatan di Bank DKI.
 - b. Merencanakan dan menyusun program kerja.
 - c. Membina pegawai.
4. Direktur Kepatuhan
 - a. Membuat kajian terhadap kelayakan dan prosedur Bank DKI.
 - b. Pengelolaan siklus proses perencanaan strategi Bank DKI.
 - c. Memberikan dukungan kepada direksi dalam memantau, mengevaluasi dan mengendalikan kinerja manajemen, operasional bisnis dan resiko-resiko usaha lainnya yang dihadapi Bank DKI.
5. Direktur Pemasaran
 - a. Berkoordinasi dan mengendalikan rencana dan aktivitas pemasaran kredit menengah dan mengelola analisa resiko kredit, analisa laporan keuangan, dan analisa kebutuhan kredit.
 - b. Koordinasi pemasaran dan pengembangan bisnis Bank Dki.
 - c. Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah.
6. Direktur Operasional
 - a. Bertanggung jawab dalam mengelola kegiatan *Real TimeGross Settlement* (RTGS), kliring, dan kiriman uang sertamelakukan pembukuan transaksi kantor pusat.
 - b. Bertanggung jawab dalam melayani keluhan atas transaksi untuk diteruskan kepada pihak terkait.
7. Direktur Keuangan

- a. Bertanggung jawab atas terselenggaranya pengelolaan portfolio secara sehat dan mengelola bisnis treasury dan jasa-jasa luar negeri sebagai salah satu bisnis yang menguntungkan bagi Bank DKI.
 - b. Mengelola kegiatan yang berhubungan dengan aktivitas penyusunan, pelaporan dan evaluasi anggaran induk, penyelenggaraan kegiatan pembukuan dan akuntansi di Bank DKI.
8. Pimpinan Cabang
- a. Menerapkan rencana kerja dan anggaran, sasaran usaha dan tujuan yang akan dicapai.
 - b. Mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi seksi-seksi kerja menurut bidang dan tugasnya.
 - c. Memasarkan produk dan jasa Bank DKI kepada nasabah.
9. Wakil Pemimpin Bidang Operasional
- a. Mengelola sistem otomasi.
 - b. Mengelola administrasi atau portepel kredit.
 - c. Mengelola administrasi dalam negeri dan kliring cabang.
 - d. Mengelola data informasi dan keuangan cabang.
 - e. Mengelola administrasi umum, logistic dan kepegawaian cabang.
 - f. Mengelola daftar pos terbuka.
 - g. Mengelola administrasi ATM Bersama.
10. Pemimpin Cabang Pembantu
- a. Memantau perkembangan usaha cabang pembantu.
 - b. Menyelesaikan permasalahan yang dihadapi cabang pembantu.
 - c. Menyelesaikan fungsi kontrol intern terhadap kegiatan usaha cabang pembantu.

I.6 Kegiatan Umum Bank DKI

Ruang lingkup kegiatan Bank DKI adalah untuk menjalankan aktivitas umum perbankan. Kegiatan umum perbankan yaitu menghimpun dana (*funding*) dan menyalurkan dana (*landing*). Kegiatan menghimpun dana atau membeli dana dari masyarakat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan yang biasa disebut rekening atau account. Berikut adalah jenis jenis simpanan :

- a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penariannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang disebut jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung pada bank yang bersangkutan.
- b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikan menggunakan buku tabungan atau ATM. Pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan. Besarnya bunga tabungan tergantung pada bank yang bersangkutan.
- c. Simpanan Deposit (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo) dan penarikannya sesuai dengan jangka waktu tersebut.

Kegiatan menyalurkan dana (*landing*) atau menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat melalui pemberian pinjaman/kredit. Kegiatan penyaluran dana ini disebut lending. Jenis-jenis kredit yang ditawarkan seperti :

- a. Kredit Investasi yaitu kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya jangka waktu kreditnya lebih dari satu tahun. Contoh : kredit untuk membangun pabrik, pembelian peralatan/mesin.
- b. Kredit Modal Kerja yaitu kredit yang digunakan untuk modal usaha, Biasanya jangka waktu kreditnya kurang dari satu tahun. Contoh : kredit pembelian bahan baku, kredit gaji karyawan.
- c. Kredit Perdagangan yaitu kredit untuk para pedagang untuk memperlancar atau mengembangkan usahanya. Contoh : kredit pembelian barang dagangan untuk supplier atau agen.

- d. Kredit Produktif yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai suatu usaha , bisa berupa investasi, modal kerja, atau perdagangan.
- e. Kredit Konsumtif yaitu kredit untuk keperluan pribadi dan konsumtif. Contoh : kredit perumahan, kredit kendaraan.
- f. Kredit Profesi yaitu kredit yang ditujukan pada kalangan profesi tertentu. Contoh : kredit untuk guru dan PNS.

Sedangkan di Bank DKI khususnya Cabang Pembantu Cinere terdapat dua jenis kredit yaitu kredit konsumtif dan kredit produktif. Kredit produktif terdiri dari kredit modal kerja (KMK) dan kredit investasi. Kredit konsumtif terdiri dari kredit multi guna (KMG) dan kredit pemilikan rumah (KPR).

I.7 Manfaat

Dalam Praktik Kerja Lapangan terdapat manfaat yang didapatkan, adapun manfaatnya adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pengalaman dan pengetahuan terhadap penerapan teori-teori yang selama ini dipelajari dalam Praktik Kerja Lapangan.
- b. Dapat memberikan pengetahuan dan pemikiran yang bermanfaat bagi penulis.
- c. Untuk mengembangkan wawasan keilmuan bagi penulis sehubungan dengan penyelesaian kredit macet terhadap pemberian kredit.